

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

World Bank dalam World Development Report 2018 mengangkat tema *Learning to Realize Education's Promise* yang menyoroti sistem pendidikan di negara-negara di dunia. Laporan ini menyoroti pentingnya memastikan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada penyediaan akses ke sekolah melainkan juga pada pencapaian hasil pembelajaran yang berkualitas. Laporan ini mengungkapkan bahwa meskipun telah terjadi kemajuan besar dalam meningkatkan partisipasi pendidikan, banyak sistem pendidikan di dunia gagal memberikan pembelajaran yang efektif (World Bank, 2023). Sebagai komitmen terhadap pendidikan dan pengembangan manusia secara global, World Bank membantu menyalurkan dana kepada negara-negara berkembang untuk membantu mereka mengaplikasikan solusi inovatif terhadap tantangan di bidang pendidikan yang mereka hadapi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerima bantuan dari World Bank untuk melakukan reformasi di bidang pendidikan. Pada tahun 2020, World Bank memberikan bantuan dana kepada Kementerian Agama sejumlah 252.50 juta USD dengan 250.00 juta USD sebagai jumlah dana komitmen untuk merealisasikan program *Realizing Education Promise and Madrasah Education Quality Reform* atau yang biasa disebut dengan REP-MEQR. (World Bank, 2024). Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan madrasah sehingga dapat

mengurangi kesenjangan antara madrasah dan sekolah umum, sekaligus memastikan para siswa yang bersekolah di madrasah memiliki akses ke pendidikan berkualitas tinggi. Pelaksanaan program REP-MEQR dimulai pada tahun 2020 dan berakhir di tahun 2024.

Sebagai negara berkembang, kualitas pendidikan di Indonesia sendiri masih rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara. Data dari Global Human Capital Report, pada tahun 2017 Indonesia berada di peringkat ke 65 dari 130 negara dalam bidang pendidikan. PISA 2018 menunjukkan jika Indonesia berada di peringkat 72 dari 79 negara yang bergabung pada Organization for Economic Co-Operation and Development.

Untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya. Tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) 2017-2030 serta RPJM 2020-2024 merupakan salah satu prioritas dalam memajukan pendidikan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut terdapat tiga rumusan sementara kebijakan Pendidikan Berkualitas. Rumusan tersebut yaitu terjadinya peningkatan kompetensi guru di bidang matematika, adanya pendampingan terhadap penguatan penjaminan mutu dan isu-isu strategis arah kebijakan lainnya, seperti peningkatan mutu pengajaran dan pembelajaran, percepatan upaya untuk mengurangi kesenjangan akses dan mutu pendidikan, perubahan pola pikir pelaku pendidikan, dan pembangunan tata kelola yang terintegrasi. Dapat disimpulkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas agar tercapainya target SDGs 2017-2030 serta RPJMN 2020-2024 maka tidak

hanya bergantung pada satu aspek seperti mengenai kualitas pembelajaran baik bagi siswa maupun pengajar, namun juga perlunya memperhatikan agar tidak terjadi kesenjangan akses pendidikan serta tata kelola administrasi pendidikan yang terintegrasi.

Selain Kemendikbud Ristek, Kementerian Agama (Kemenag) memiliki peran penting dalam mengelola sistem pendidikan di Indonesia. Kemenag memiliki peran dalam mengelola pendidikan agama dan keagamaan, serta mengatur pendidikan agama di sekolah umum yang berada di bawah Kemendikbudristek. Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang berada di bawah pengawasan Kemenag. Keberadaan madrasah sebagai lembaga pendidikan di Indonesia sangat penting. Data dari Kementerian Agama menyatakan, setidaknya ada 53 juta anak Indonesia yang terdaftar pendidikan formal baik di sekolah negeri maupun swasta yang diawasi oleh Kemendikbud dan Kemenag, dengan 15 persen (8 juta) dari seluruh siswa sekolah dasar dan menengah terdaftar di sekolah-sekolah yang dikelola oleh Kemenag (Kemenag, 2020). Sekolah-sekolah yang dikelola oleh Kemenag menerima siswa-siswa yang rentan secara ekonomi pada tingkat yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang dikelola oleh Kemendikbud, serta memiliki proporsi perempuan yang lebih tinggi.

Akan tetapi, dalam memenuhi kebutuhan pendidikan ini, sekolah-sekolah dibawah Kemenag menghadapi berbagai masalah. Masalah seperti penyediaan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) untuk guru, direktur sekolah, serta pengawas yang masih sangat terbatas, hingga sekolah-sekolah

Kemenag yang lebih dari separuh tidak memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) minimum yang disyaratkan. Untuk mengatasi permasalahan ini, Kemenag melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan madrasah. Dana dari pemerintah untuk pendidikan Kemenag sendiri sudah ada namun kemudian Kemenag masih membutuhkan dana dalam melakukan reformasi di sistem pendidikan ini. Salah satu cara yang ditempuh yaitu dengan melakukan kerjasama internasional dengan World Bank.

Realizing Education's Promise – Madrasah Education Quality Reform atau biasa disingkat dengan REP – MEQR merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian Agama yang bekerjasama dengan World Bank. Program ini merupakan bagian dari Realizing Education's Promise (REP) yang merupakan inisiasi global dari World Bank di bidang pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara-negara berkembang yang menargetkan pendidikan di tingkat dasar. Di Indonesia sendiri, program REP dengan mengusung nama REP – MEQR dijalankan oleh Kementerian Agama yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah di madrasah-madrasah di seluruh Indonesia.

Implementasi REP – MEQR menasar ke seluruh madrasah yang berada di 34 provinsi serta 514 kabupaten/kota di Indonesia. Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi tempat implementasi program REP-MEQR. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai Peranan Bank Dunia Dalam Peningkatan Daya Saing Pendidikan: Studi Kasus Program REP-MEQR di Sulawesi Selatan.

1.2. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini akan membahas mengenai peranan program Realizing Education's Promise dalam upaya meningkatkan daya saing madrasah. Penelitian ini berfokus pada studi kasus program REP-MEQR di Sulawesi Selatan.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran Bank Dunia dalam pendidikan di Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana dampak program REP-MEQR dalam peningkatan daya saing pendidikan di madrasah di Sulawesi Selatan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana peran Bank Dunia dalam pendidikan di Sulawesi Selatan.
2. Untuk menganalisis bagaimana dampak dari program REP-MEQR dalam peningkatan daya saing pendidikan di Sulawesi Selatan.

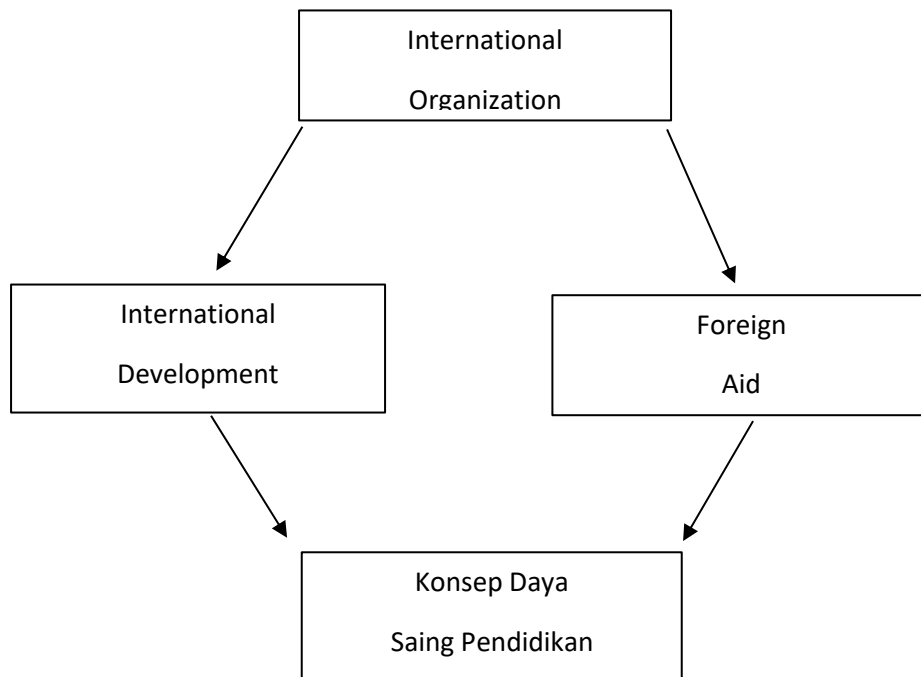
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan pemahaman kepada penulis maupun pembaca khususnya mahasiswa/I program studi Ilmu Hubungan Internasional terkait antarnegara dalam bantuan luar negeri serta kajian mengenai pendidikan

2. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan penelitian khususnya isu-isu mengenai pendidikan dalam isu Ilmu Hubungan Internasional

1.4. Kerangka Konseptual

Bagan 1.1 Kerangka Konseptual 1



1.4.1 International Organization

International Organization atau Organisasi Internasional, secara konvensional, dapat didefinisikan sebagai tatanan formal yang melampaui batas-batas negara yang mengatur pembentukan lembaga-lembaga untuk memfasilitasi kerjasama di antara para anggota dalam bidang keamanan, ekonomi, sosial, atau bidang-bidang yang terkait (Plano & Olton, 1978). Organisasi internasional, yang didefinisikan sebagai organisasi antar pemerintah yang inklusif, merupakan fenomena baru dalam hubungan

internasional (Barkin, 2006). Dalam pembahasan ilmu hubungan internasional, keberadaan organisasi internasional ini merupakan hal yang cenderung baru. Pembahasan mengenai organisasi internasional sudah ada sebelum PBB muncul. Terdapat banyak gagasan mengenai organisasi internasional dari para ilmuwan dan filsuf pada abad ke-18 dan ke-19 antara lain; Henri de Saint-Simon menyerukan “Parlemen Eropa” yang menandai munculnya fenomena regionalisme; Jeremy Bentham mengusulkan sebuah gagasan “*Common Court of Judicature*” dan “*Common Legislature*” di antara negara bagian yang menawarkan model awal pembangunan supranasional; dan Immanuel Kant yang mengusulkan “*League of Peace*” di antara “*Free State*” yang kemudian digaungkan oleh pendukung keamanan kolektif pada abad ke-20 (Rochester, 1986). Identifikasi organisasi internasional secara sistematis baru dimulai ketika Liga Bangsa-Bangsa dibentuk pada tahun 1920.

Organisasi internasional dapat dibedakan berdasarkan tipe keanggotaan yang didalamnya terdapat *Intergovernmental Organization* (IGO atau organisasi antar pemerintah yang anggotanya merupakan perwakilan negara-negara di dunia dan *Non-Governmental Organization* (NGO) yang merupakan organisasi non-pemerintah yang anggotanya merupakan kelompok-kelompok swasta dalam bidang ekonomi, lingkungan, budaya, dan lain-lain.

Untuk melihat posisi organisasi internasional di dunia, kita dapat melihat melalui bagaimana peran organisasi internasional di dalam sistem internasional. Menurut Clive Archer, terdapat tiga peran organisasi internasional di dalam

sistem internasional, yaitu: instrumen, arena, dan aktor. Pertama, sebagai instrumen. Organisasi internasional berperan sebagai alat oleh anggota-anggotanya untuk mengejar kepentingan mereka. Mantan sekretaris Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa, Gunnar Myrdal, menegaskan jika organisasi internasional memiliki peran sebagai komponen diatas negara berdaulat. Organisasi internasional menjadi instrumen oleh negara-negara untuk memenuhi kebijakan maupun kepentingan masing-masing serta menjadi sarana diplomasi untuk negara-negara berdaulat (Archer, 2001).

Kedua, organisasi internasional sebagai arena. Sebagai sebuah arena atau forum, organisasi internasional berperan untuk mewadahi interaksi negara-negara anggotanya. Organisasi internasional menyediakan tempat pertemuan bagi para anggota untuk berdiskusi, berdiplomasi, berdebat, maupun menyatakan ketidaksetujuan terhadap suatu kebijakan. Sebagai sebuah wadah, arena ini harus bersifat netral. Sebagai arena, organisasi internasional menjadi tempat untuk membahas permasalahan dalam negeri negara anggota sehingga mendapat perhatian oleh dunia internasional (Archer, 2001).

Ketiga, organisasi internasional sebagai aktor. Dalam sistem internasional, organisasi internasional berperan sebagai aktor independen. Aktor independen ini berarti organisasi internasional menjadi aktor secara utuh maupun sebagian dalam kancah dunia bertindak dan dapat bertindak tanpa adanya intervensi dari luar organisasi, yang dalam kata lain organisasi

internasional sebagai aktor yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan luar (Archer, 2001).

Selain itu untuk melihat kedudukan organisasi internasional di dunia dapat menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan institusional dan pendekatan rezim. Pendekatan institusional melihat pada struktur formal, organisasi, dan hirarki birokrasi organisasi internasional. Pendekatan ini akan menekankan pada pentingnya memahami fungsi didalam organisasi internasional. Dengan ini, pendekatan ini akan melihat apa yang terjadi di dalam organisasi internasional (Barkin, 2006).

Pendekatan rezim akan melihat bagaimana efek dari organisasi internasional terhadap aktor-aktor lain khususnya negara. Pendekatan ini mempelajari organisasi internasional dengan melihat perilaku negara dan efek dari norma dan aturan yang diwujudkan oleh organisasi terhadap perilaku tersebut. Dengan ini, pendekatan rezim melihat organisasi internasional dari luar, dimana organisasi internasional dapat memberikan efek terhadap negara maupun aktor-aktor lain (Barkin, 2006).

Sejak Perang Dunia II, organisasi internasional terus berkembang mencakup isu-isu yang lebih luas. World Bank merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang pembangunan. World Bank, bersama dengan IMF, merupakan lembaga keuangan internasional. World Bank meminjamkan uang untuk membiayai proyek-proyek pembangunan berupa

infrastruktur fisik maupun manusia yang dibutuhkan untuk mendorong pengembangan dan pembangunan ekonomi (Barkin, 2006).

Konsep ini akan membantu memahami mengenai World Bank yang merupakan salah satu organisasi internasional yang merupakan penyalur bantuan untuk program REP-MEQR yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan dasar di Indonesia. Analisis ini akan membantu memahami mengenai posisi World Bank, struktur, dan bagaimana World Bank bekerja sebagai organisasi internasional yang berfokus di bidang pembangunan.

1.4.2 International Development & Foreign Aid

Konsep pembangunan internasional muncul pada saat pembahasan mengenai pembangunan manusia. Keterkaitan antara pembangunan internasional dengan pembangunan manusia membuat konsep pembangunan internasional menjadi bersifat holistik dan mencakup bantuan luar negeri, *governance*, *healthcare*, pendidikan, dan berbagai macam isu lainnya. Tujuan dari pembangunan internasional yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kualitas hidup yang lebih baik di negara-negara berkembang dan dunia ketiga (Mahottama, 2011).

Perkembangan ekonomi dunia melesit setelah Perang Dunia II. Negara-negara maju pulih dengan cepat dari kehancuran perang dan terus bertumbuh dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Negara-negara berkembang memiliki performa pertumbuhan dengan rata-rata yang baik. Pada

tahun 1997, World Bank dalam Laporan Pembangunan Dunia mencantumkan 133 negara dengan klasifikasi 49 negara berpenghasilan rendah, 41 negara berpenghasilan menengah ke bawah, 17 negara berpenghasilan menengah ke atas, dan 26 negara berpenghasilan tinggi (World Bank, 1997). Terjadinya perkembangan dan kemajuan dengan tingkat yang relatif memungkinkan negara-negara yang tadinya sangat miskin pada periode pasca perang menjadi negara berpenghasilan menengah dan berpenghasilan tinggi.

Meskipun ada banyak contoh pembangunan yang berhasil, masih terdapat kesenjangan yang melebar antara negara-negara yang berpenghasilan tinggi dengan negara-negara yang berpenghasilan rendah. Negara-negara berpenghasilan rendah sebagian besar berasal dari Afrika, beberapa negara di Asia, dan Amerika Latin. Jumlah penduduk miskin dan kurang gizi di negara-negara ini meningkat. Bantuan-bantuan untuk mengatasi kemiskinan disalurkan khususnya di Afrika dan Asia. Dengan adanya bantuan-bantuan ini juga membantu mendorong pembangunan ekonomi di negara-negara tersebut.

Konsep pembangunan internasional berhubungan erat dengan *international aid* atau bantuan luar negeri, yang bisa disebut juga dengan *foreign aid*. Pembangunan internasional mengharapkan partisipasi negara-negara maju untuk membantu pembangunan negara-negara berkembang. Hal ini kemudian dimanifestasikan dalam bentuk Millenium Development Goals (MDGs), khususnya di poin ke-delapan yang dimana diharapkan terjadinya

kemitraan global, terutama antara negara maju dengan negara berkembang. Kemitraan global ini bermaksud untuk membantu proses pembangunan negara berkembang, yang biasanya diberikan oleh negara maju dalam bentuk bantuan luar negeri (Mahottama, 2011).

Foreign aid merupakan bantuan atau donor berupa materi yang mencakup uang, barang, dan jasa; oleh negara pemberi kepada negara penerima, sehingga bersifat keputusan politik, yaitu diadakan sekaligus diatur oleh pemerintah pemberi dengan menggunakan modal dan dana publik, untuk diberikan kepada pemerintah penerima (Riddell, 2007, pp. 91). Pemberian *foreign aid* berkembang sejak akhir 1940-an dimana terdapat program yang bernama Marshall Plan yang membantu memulihkan keadaan ekonomi negara-negara di dunia yang hancur setelah mengalami masa perang (Dornan dan Pryke, 2017). Dalam perkembangannya, pemberian bantuan luar negeri tidak lepas dari tujuan untuk kemanusiaan juga sebagai sebuah bentuk untuk mendorong tercapainya kepentingan nasional negara pemberi bantuan (Lowy Institute, 2014).

Salah satu bentuk *foreign aid* yaitu *development aid* (bantuan pembangunan) atau yang dikenal juga dengan *development assistance*. *Development aid* merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah negara atau lembaga donor untuk mendukung usaha pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial politik negara-negara berkembang. *Development aid*

umumnya diperuntukan usaha yang bersifat jangka panjang seperti penanggulangan kemiskinan (Mahottama, 2011).

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menggunakan istilah *Official Development Assistance* dalam menjelaskan *development aid*. Melalui definisi dari OECD, *Official Development Assistance* (ODA) memiliki tiga elemen, yaitu: (1) Dilaksanakan oleh pemerintah, (2) Ditujukan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sebagai tujuan utamanya, dan (3) bantuan finansial bersifat konsesi dan apabila berupa pinjaman maka 25 persennya merupakan hibah. (Mahottama, 2011). Pemberian ODA bersifat bilateral dan multilateral. Pemberian bantuan bilateral biasanya langsung diberikan dari satu negara donor ke negara penerima. Pemberian secara multilateral biasanya diserahkan oleh negara-negara donor kepada lembaga-lembaga internasional seperti World Bank, yang kemudian didistribusikan ke berbagai negara yang membutuhkan bantuan tersebut.

Dalam disiplin ilmu Hubungan Internasional, *foreign aid* pada dasarnya merupakan salah satu alat diplomasi yang digunakan negara sebagai aktor utama untuk mencapai kepentingan nasionalnya sehingga masuk dalam narasi realis. *Foreign aid* memiliki fungsi lain selain memberikan keuntungan bagi negara penerima yaitu; sebagai tanda persetujuan diplomatik, menambah kekuatan militer sekutu, memberikan penghargaan kepada pemerintah negara lain karena berperilaku sesuai kehendak pihak donor, memperluas pengaruh

budaya pihak donor, dan sebagai usaha untuk mendapatkan akses perekonomian di negara penerima (Lancaster, 2007).

Adapun penelitian ini akan membahas mengenai salah satu bentuk ODA yang disalurkan oleh World Bank dengan tujuan memperbaiki kualitas pendidikan dasar di Indonesia. Melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, program pengembangan dan perbaikan pendidikan dasar dilakukan dengan dana yang diterima dari World Bank. Analisis dilakukan dengan melihat penyaluran dana untuk program REP-MEQR serta bagaimana program tersebut berjalan di Indonesia.

1.4.3 Konsep Daya Saing Pendidikan

Daya saing sekolah dapat diartikan sebagai kemampuan satuan pendidikan sekolah untuk melakukan tindakan atau upaya tertentu dalam rangka meningkatkan mutu pendidikannya agar lebih unggul dan mampu bersaing dengan satuan pendidikan lain yang setara. Secara konsep, salah satu cara untuk meningkatkan daya saing sekolah yaitu dengan melakukan inovasi (Tholkhah, 2016).

Menurut Tholkhah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi daya saing sekolah. Pertama, *leadership* atau kepemimpinan. Kualitas kepemimpinan kepala sekolah sangat mempengaruhi tingkat daya saing sekolah. Kepala sekolah yang memiliki kualitas kepemimpinan yang tinggi akan mampu menggerakkan, memanfaatkan, dan membangun komitmen yang tinggi kepada

seluruh unsur sekolah yang secara bersama akan meningkatkan daya saing sekolah.

Kedua, inovasi pembelajaran sekolah. Tingkat daya saing sekolah akan sangat ditentukan dengan ada dan tidaknya inovasi pembelajaran di sekolah tersebut. Inovasi pembelajaran ini termasuk pembaharuan metodologi pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas belajar siswa. Inovasi pembelajaran ini ada yang bersifat substansi, dimana sekolah memberikan pembelajaran tambahan di luar kurikulum konvensional, dan inovasi yang bersifat instrumental dimana sekolah menyiapkan sarana belajar yang canggih dan unik yang memiliki daya tarik dan citra positif bagi masyarakat.

Ketiga, kualitas pendidik. Kualitas pendidik akan memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas peserta didik dalam meraih prestasi. Dengan adanya peningkatan terhadap jumlah peserta didik berprestasi maka akan memberikan dampak pada meningkatnya daya saing sekolah tersebut.

Keempat, kualitas sarana. Kualitas sarana yang dimiliki sekolah memiliki pengaruh terhadap daya saing madrasah. Semakin tinggi kualitas sarana maka akan semakin memiliki daya tarik masyarakat untuk memasukkan anak mereka ke sekolah.

Kelima, kualitas kerjasama. Kerjasama yang dilakukan oleh sekolah akan memberikan keuntungan yang besar baik dari segi material maupun non-material.

Keenam, prestasi sekolah. Prestasi yang dimiliki oleh sekolah menjadi indikasi dari kualitas dan daya saing sekolah tersebut. Semakin besar jumlah prestasi yang dimiliki oleh sekolah maka akan semakin meningkatkan daya tarik masyarakat dan daya saing sekolah. Prestasi yang dimiliki oleh sekolah dapat berupa prestasi peserta didik, pendidik, maupun institusi itu sendiri.

Ketujuh, minat masyarakat. Jumlah peminat yang masuk sekolah menjadi indikator penentu kualitas sekolah. Semakin banyak peminat yang masuk ke sekolah, semakin tinggi daya saing yang dimiliki sekolah.

Penelitian ini sendiri akan membahas mengenai program REP-MEQR terhadap peningkatan daya saing madrasah. Konsep ini akan membantu menganalisis bagaimana program REP-MEQR mempengaruhi peningkatan daya saing madrasah. Analisis akan berfokus pada 4 komponen di program REP-MEQR dan menggunakan beberapa faktor dalam konsep ini untuk melihat terjadinya peningkatan daya saing di madrasah-madrasah tempat implementasi program REP-MEQR.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menganalisis keterkaitan dan pengaruh antar variabel penelitian.

1.5.2 Jenis Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer umumnya digunakan untuk kebutuhan perolehan informasi yang mencerminkan kebenaran atau sesuai dengan kondisi faktual sehingga informasi yang didapatkan dapat berguna dalam penelitian dan pengambilan keputusan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari suatu objek penelitian. Adapun yang mencakup data sekunder yaitu data yang diperoleh dari situs atau referensi lain seperti buku, jurnal. Laporan, atau referensi lain yang sama dengan apa yang diteliti oleh penulis.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data primer, penelitian ini akan menggunakan metode wawancara terstruktur kepada pihak madrasah, fasilitator program, dan masyarakat sekitar, dalam hal ini orang tua siswa atau siswa, yang turut merasakan dampak dari program ini. Wawancara akan dilakukan dengan panduan pertanyaan terstruktur untuk menggali informasi seputar proses implementasi program, teknis, hasil, serta dampaknya.

Selain itu, pengumpulan data sekunder akan dilakukan melalui studi pustaka. Literatur yang relevan dengan topik penelitian akan dihimpun dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dokumen, situs web internet, surat kabar, dan laporan resmi. Literatur khusus yang digunakan berasal dari dokumentasi, laporan, atau literatur terkait yang berasal dari World Bank dan Kementerian Agama yang terkait dengan Program Realizing Education's Promise.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Analisis data terhadap data kualitatif dan melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hubungan pola yang terdapat pada data primer dan sekunder.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas konsep-konsep yang digunakan sebagai alat pendukung analisis dan argumentasi penulis mengenai Peranan Bank Dunia dalam Peningkatan Daya Saing Pendidikan melalui Program REP-MEQR di Sulawesi Selatan. Fokus utama bab ini meliputi konsep *International Organization* yang mencakup bagaimana organisasi internasional dalam studi ilmu hubungan internasional dan peran organisasi internasional dalam hubungan internasional. Selanjutnya konsep *International Development & Foreign Aid* yang mencakup penjelasan mengenai bentuk, jenis, motif, dan perspektif *Foreign Aid* yang mendukung penelitian ini. Konsep berikutnya yaitu Konsep Peningkatan Daya Saing Sekolah yang mencakup kriteria dari peningkatan daya saing sekolah. Ketiga konsep ini kemudian akan diperkuat dengan pemaparan penelitian terdahulu yang relevan, guna memaparkan aspek komparasi dan aspek kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan.

2.1 International Organization

Pembahasan mengenai *International Organization* (IO) atau Organisasi Internasional (OI) dalam ilmu hubungan internasional merupakan hal yang cenderung baru. Tidak ada definisi baku mengenai *international organization*. Plano dan Olton mendefinisikan *international organization* sebagai tatanan formal yang melampaui batas-batas negara yang mengatur pembentukan lembaga-

lembaga untuk memfasilitasi kerjasama di antara para anggota dalam bidang keamanan, ekonomi, sosial, atau bidang-bidang terkait (Plano & Olton, 1978). Barkin mendefinisikan *international organization* sebagai organisasi antar pemerintah yang inklusif serta merupakan fenomena baru dalam hubungan internasional (Barkin, 2006).

Clive Archer mendefinisikan *international organization* sebagai struktur formal dan berkesinambungan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antar anggota, baik perwakilan pemerintah atau bukan, dari setidaknya dua negara berdaulat dengan tujuan mengejar kepentingan bersama keanggotaannya, mencakup berbagai lembaga bahkan jika asosiasi yang mencari keuntungan tidak termasuk didalamnya (Archer, 2001)

Pembahasan mengenai *international organization* dimulai dari membandingkan bagaimana teori-teori atau tradisi-tradisi dalam ilmu hubungan internasional melihat organisasi internasional. Realis memandang organisasi internasional sebagai bagian dari hubungan yang terselenggara antara negara dan pemerintah. Mereka memiliki pandangan yang berpusat pada negara (*state-centric*) tentang dunia politik dan tidak tertarik pada INGO. Perhatian utama realis adalah bagaimana hubungan internasional dapat dikelola dengan sebaik-baiknya, bukan bagaimana sistem dapat direformasi atau diperbaiki. Bagi para realis, Organisasi Internasional mencerminkan keseimbangan kekuatan dan kepentingan suatu negara. Dengan demikian, lebih masuk akal untuk memahami organisasi

internasional sebagai alat dalam perebutan kekuasaan negara-negara dibandingkan sebagai aktor independen (Barkin, 2006)

Para realis memiliki kesamaan asumsi tentang keutamaan negara sebagai aktor internasional, pemisahan antara politik domestik dan internasional, dan anarki dan perjuangan yang sedang terjadi untuk mendapatkan kekuasaan dan keamanan (Griffiths 1992:217). Pandangan realis ini diwakili oleh E.H Carr dan Georg Schwarzenberger di Inggris dan Reinhold Niebuhr dan Hans Morgenthau di Amerika Serikat. Titik tolak mereka adalah keberadaan sistem negara saat ini, dimana tidak ada otoritas bersama di atas negara berdaulat dan dimana ada anarki internasional dalam arti tidak adanya pemerintahan di tingkat internasional dalam arti kurangnya pemerintahan di tingkat internasional.

Terdapat beberapa kritik utama realis terhadap organisasi internasional. Pertama, dari sudut pandang moral, dapat dikatakan realis sangat kurang karena sangat mudah menerima status quo dalam politik internasional dan tidak mengizinkan organisasi internasional berperan positif dalam menciptakan dunia yang lebih baik. Akan tetapi, hal ini mengabaikan bahwa dalam tulisan-tulisan sejumlah tokoh realis – Carr, Schwarzenberger, dan Niebuhr – terdapat aspek moral dan aspek Kristiani. Morgenthau menaruh perhatian yang sama pada aspek moral politik sama seperti halnya orang-orang sezamannya yang menolak ajaran politik kekuasaan.

Kedua, yaitu kritik utama terhadap realis terhadap organisasi internasional. Salah satu kritik utama terhadap realis terhadap organisasi internasional adalah

penekanan pada “politik tinggi”, perdamaian dan perang, dengan mengabaikan politik rendah seperti hubungan ekonomi, teknis, dan hubungan budaya. Organisasi internasional dipandang hanya sebagai instrumen kebijakan bagi negara-negara sedangkan organisasi-organisasi non-pemerintah internasional hampir tidak dipertimbangkan. Akan tetapi hal ini dapat dimengerti karena tulisan-tulisan tentang politik kekuasaan muncul sebelum ekspansi besar-besaran INGO sejak tahun 1960-an. Realis berakar pada reaksi terhadap kelemahan demokrasi Barat ketika berhadapan dengan Hitler dan Mussolini di tahun 1930-an dan menemukan “kakinya” pada periode pasca perang dingin. Oleh karenanya, realis bersikap antipati terhadap organisasi internasional yang dianggap terkait dengan Liga Bangsa-Bangsa yang didiskreditkan.

Sama dengan realis, neorealis memandang organisasi internasional sebagai instrumen negara berdaulat. Akan tetapi, pemahaman ini lebih disempurnakan oleh neorealis dimana organisasi-organisasi tersebut mencerminkan hegemoni dari anggota-anggota yang paling kuat. Mereka juga dapat menyediakan forum dengan potensi untuk menjadi lebih efisien daripada diplomasi tradisional atau konferensi yang tidak teratur, meskipun ada bahaya ketika mereka mencoba untuk menjadi aktor sendiri. Lembaga-lembaga internasional mencerminkan realitas dari situasi dari politik internasional yang terstruktur oleh distribusi kekuasaan yang tidak merata. Organisasi-organisasi internasional seperti PBB diharapkan dapat menanggung jejak kekuatan hegemoni utama, yang dalam kasus ini adalah Amerika Serikat. Neorealis sendiri menerima jika kekuatan hegemonik dapat menurun tetapi

kurang mampu menangani konsekuensi dari penurunan ini pada struktur hubungan internasional.

Secara alami, peran yang dimainkan oleh sebuah organisasi internasional akan mempengaruhi fungsi yang dijalankannya dalam hubungan internasional. Clive Archer membagi peran organisasi internasional menjadi tiga: instrumen, arena, dan aktor.

Organisasi internasional berperan sebagai instrumen yang digunakan untuk mencapai kepentingan negara. Secara umum, organisasi internasional digunakan oleh negara untuk mencapai tujuan-tujuannya, khususnya dengan IGO dimana anggota-anggotanya merupakan negara berdaulat yang memiliki kekuasaan untuk membatasi tindakan independen dari organisasi internasional. Gunnar Myrdal, mantan Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa menguraikan bagaimana peran organisasi internasional sebagai berikut:

“Gagasan fiktif dasar tentang organisasi antar-pemerintah, seperti yang disampaikan oleh konstitusi mereka, adalah bahwa mereka adalah sesuatu yang lebih dari sekadar bagian komponennya: sesuatu yang berada di atas negara nasional. Dalam kasus yang umum terjadi, organisasi internasional tidak lain adalah instrumen untuk kebijakan masing-masing pemerintah, alat untuk diplomasi sejumlah negara nasional yang berbeda dan berdaulat. Ketika sebuah organisasi antar pemerintah dibentuk, hal ini menyiratkan tidak lebih dari bahwa antara negara-negara telah dicapai kesepakatan terbatas pada bentuk kelembagaan untuk pelaksanaan kegiatan negara secara multilateral

dalam bidang tertentu. Organisasi ini menjadi penting bagi pelaksanaan kebijakan nasional justru ketika koordinasi multilateral semacam itu merupakan tujuan nyata dan berkesinambungan dari pemerintah nasional”

Pandangan Myradal terhadap menempatkan organisasi internasional dalam hal ini IGO berperan sebagai alat bantu yang mudah digunakan oleh negara-negara anggotanya. INGO sendiri berperan mencerminkan persyaratan dari berbagai serikat pekerja, organisasi bisnis, partai politik, atau kelompok-kelompok yang menjadi anggotanya. Konsekuensi bagi organisasi internasional adalah organisasi tersebut kemungkinan besar akan diperebutkan oleh anggota yang paling kuat dan dengan ini peluang dari organisasi internasional tersebut untuk bertindak secara independen menjadi terbatas.

Peran kedua organisasi internasional adalah peran sebagai arena atau forum di mana tindakan-tindakan dilakukan. Dalam hal ini, organisasi internasional berperan dalam menyediakan tempat bagi negara-negara untuk berinteraksi secara teratur dan terorganisir, khususnya dalam diplomasi dan penyelesaian isu global. Organisasi internasional dapat dilihat menjadi sebagai sebuah forum dimana para aktor melakukan tindakan (Archer, 2001). Hal ini berarti jika organisasi internasional berperan dalam menyediakan tempat bagi negara-negara anggotanya untuk berdiskusi dan bernegosiasi mengenai isu-isu global secara terbuka, menyampaikan pandangan dan kepentingan nasional mereka di hadapan komunitas internasional, membangun konsensus melalui dialog multilateral, dan mengurangi ketegangan serta mencegah konflik.

Sebagai tempat berdiskusi dan bernegosiasi, organisasi internasional berfungsi sebagai forum dimana anggota dapat menyampaikan pandangan mereka secara terbuka dan publik, berbeda dengan diplomasi bilateral yang tertutup. Sebagai forum untuk menyampaikan pandangan dan kepentingan, organisasi internasional dapat menjadi wadah bagi anggotanya untuk menyampaikan kepentingan dan pandangannya tanpa harus menciptakan forum baru setiap kali. Terakhir, sebagai forum untuk membangun consensus melalui dialog multilateral, organisasi internasional memungkinkan negara-negara ini menyepakati prinsip-prinsip umum atau iuran internasional yang sulit untuk dicapai secara bilateral. Selain itu organisasi internasional juga menjadi sarana bagi anggotanya untuk melakukan komunikasi multilateral yang melibatkan banyak pihak sekaligus yang siap membantu mendorong transparansi dan akuntabilitas. Organisasi internasional juga memiliki peran dalam mengurangi ketegangan dan mencegah konflik. Dengan adanya forum diskusi yang tetap dan terlembaga, negara-negara memiliki jalur komunikasi yang jelas untuk menyelesaikan perbedaan secara damai, alih-alih melalui konflik bersenjata.

Archer menekankan bahwa sebagai arena, organisasi internasional harus bersifat netral. Mengutip dari Stanley Hoffman yang menyatakan:

“Sebagai sebuah arena dan pertarungan, hal ini sangat berguna bagi setiap kelompok yang bersaing yang ingin mendapatkan tidak hanya forum untuk pandangan mereka tetapi juga penguatan diplomatik untuk kebijakan mereka, dalam Perang Dingin dan juga dalam perang dekolonisasi.” (Hoffmann 1970: 398–9)

Dengan sifat yang netral ini, maka para anggota organisasi internasional dapat menggunakannya untuk tempat melakukan kerjasama maupun konflik.

Dalam perannya sebagai forum, Majelis Umum PBB memenuhi persyaratan yang sering dicari oleh organisasi internasional. Ketika anggota organisasi ingin bernegosiasi baik secara setuju maupun tidak setuju secara terbuka, mereka dapat melakukan secara bilateral maupun multilateral. Para anggota ini dapat menentukan pertemuan ad hoc untuk tujuan mereka. Pertama, mereka harus menyepakati waktu, tempat, protocol, bahkan bentuk meja yang akan digunakan untuk duduk bersama. Mereka juga harus menyepakati agenda, metode pemungutan suara, serta aturan penerimaan negosiasi. Organisasi internasional berperan sebagai penyedia forum yang sudah ada.

Peran ketiga dari organisasi internasional yaitu sebagai aktor independen. Organisasi internasional tidak hanya berfungsi sebagai forum atau alat bagi negara-negara anggota, tetapi juga dapat bertindak sebagai aktor independen dalam tatanan global. Organisasi internasional tidak hanya dilihat sebagai hasil dari hubungan antar negara, melainkan juga sebagai aktor yang dapat mempengaruhi hubungan tersebut secara independen. Organisasi semacam ini memiliki struktur, sumber daya, dan legitimasi yang memungkinkan mereka bertindak secara otonom, terlepas dari kepentingan langsung negara-negara anggota (Archer, 2001).

Pandangan Archer mengenai peran organisasi internasional sebagai aktor ini melampaui pandangan instrumental murni tentang OI yang melihat mereka hanya sebagai alat dari negara. Secara umum, idenya adalah bahwa organisasi

internasional bukan hanya alat negara tetapi juga dapat memiliki tingkat kemandirian (Alvarez, 2004). Organisasi internasional mengembangkan budaya organisasi, struktur birokrasi, dan serangkaian prioritas mereka sendiri yang dapat membentuk perilaku mereka dan membuat mereka lebih dari sekedar penjumlahan dari kepentingan negara anggotanya.

Organisasi internasional dapat bertindak sebagai aktor otonom dalam sistem internasional, tidak hanya sebagai alat dari negara anggotanya. Sebagai aktor otonom, organisasi internasional bisa bertindak mandiri dalam beberapa kondisi, misalnya ketika sekretariat memiliki kekuasaan teknokratik atau saat lembaga-lembaganya menjalankan tugas berdasarkan mandate hukum yang luas. Organisasi internasional juga bukan semata hanya menjadi alat dari negara-negara anggotanya, dimana organisasi ini seringkali mengembangkan dinamika dan kepentingan sendiri khususnya bila memiliki sumber daya, staf, dan struktur keputusan yang kompleks.

2.2 International Development and Foreign Aid

Pembangunan internasional merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan sistem sosial yang adil secara berkelanjutan di negara-negara berkembang. Pembangunan internasional tidak hanya menyangkut pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup transformasi struktural dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat (Todaro and Smith, 2015).

Pembangunan internasional memiliki kaitan yang erat dengan bantuan luar negeri atau disebut juga dengan *foreign aid*. Dalam melaksanakan pembangunan internasional diharapkan partisipasi negara-negara maju untuk membantu pembangunan negara-negara berkembang. Hal ini kemudian dimanifestasikan dalam bentuk Millenium Development Goals (MDGs), khususnya di poin kedelapan yang mengharapkan terjadinya kemitraan global khususnya antara negara maju dan negara berkembang. Kemitraan global ini bertujuan untuk membantu proses pembangunan negara berkembang, yang biasanya diberikan oleh negara maju dalam bentuk bantuan luar negeri (Mahottama, 2011).

Istilah *foreign aid* mulai muncul sejak Perang Dunia II dimana Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan utama yang mendominasi bantuan luar negeri. Melalui Marshall Plan, Amerika Serikat memberikan bantuan besar-besaran untuk membangun kembali Eropa pasca-perang dengan harapan dapat menjadi stimulan bagi ekonomi AS dengan membangun pasar untuk barang-barang Amerika (Alyssa, 2023). Marshall Plan berhasil memulihkan keadaan ekonomi negara penerima bantuan. Ekonomi Eropa tumbuh pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, kongres mengalokasikan dana sebesar \$13,3 miliar sebagai biaya pemulihan, yang dimana bantuan ini menyediakan modal dan bahan baku yang sangat dibutuhkan yang memungkinkan Eropa untuk membangun kembali ekonomi mereka (USembassy, 2024).

Setelah Perang Dingin, fokus dari *foreign aid* berubah. *Foreign aid* dialihkan fokusnya untuk mendorong pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. Alur

pemberian bantuan menjadi berubah dimana yang tadinya hanya diberikan kepada sekutu terdekat dan dinilai berdasarkan strategis-tidaknya posisi dalam membendung ideologi lawan, kini bantuan tersebut lebih diprioritaskan untuk negara-negara yang lebih membutuhkan. (Mahottama, 2011).

Kajian *foreign aid* pertama kali diperkenalkan oleh Hans Morgenthau pada tahun 1962 dalam karyanya yang berjudul “A Political Theory of Foreign Aid”. Morgenthau berpendapat bahwa bantuan luar negeri berfungsi sebagai alat bagi negara-negara untuk mencapai kepentingan mereka, meskipun pendapat ini masih menjadi subjek perdebatan. Akan tetapi, ia juga menyatakan bahwa bantuan luar negeri merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh beberapa negara kaya terhadap negara-negara miskin (Morgenthau, 1962).

Dalam karyanya tersebut, Morgenthau mengkategorikan jenis bantuan luar negeri pada 6 bentuk: bantuan luar negeri kemanusiaan (*humanitarian aid*), bantuan luar negeri untuk kebutuhan dasar (*subsistence*), bantuan luar negeri militer (*military*), suap (*brbery*), bantuan luar negeri untuk prestise (*prestige*), dan bantuan luar negeri untuk pembangunan ekonomi (*economic development*) (Morgentahu, 1962). Adapun KJ Hoslti dalam *International Politics; A Framework for Analysis* edisi kelima mengkategorikan jenis bantuan luar negeri pada 4 bentuk, yaitu: bantuan militer, bantuan teknis, hibah dan program impor komoditas, dan bantuan pembangunan (Holsti, 1988).

Dalam kajian hubungan internasional, *foreign aid* merupakan salah satu alat diplomasi yang digunakan oleh negara sebagai salah satu alat diplomasi untuk

mencapai kepentingan nasionalnya, sehingga masuk dalam narasi realis (Lancaster, 2007). Pada fungsi tertingginya, *foreign aid* menyiratkan penggunaan sarana dan alat ekonomi dalam diplomasi ekonomi untuk tujuan politik, dicerminkan dari kebalikannya, yaitu sanksi negatif dan embargo yang dijatuhkan oleh suatu negara kepada negara lain (Baldwin, 1985; Lee & Hocking, 2010: 6; Okano-Heijmans, 2011). Meskipun solidaritas masyarakat global terhadap HAM semakin meningkat, kepentingan nasional secara implisit masih didahulukan sehingga mengusung narasi neorealis (Pugh, 2019 p.4; Kine, 2017; Jain P., 2016b). Narasi tersebut merupakan bagian dari konsep *foreign aid* sambil menyiratkan kepentingan ekonomi (Sato & Hirata, 2008; Hook & Zhang, 1998). Riddel juga menyatakan adanya kepentingan pelestarian atau peningkatan citra nasional dalam *foreign aid*. Oleh karenanya, *foreign aid* dapat didasari oleh kepentingan politik, kepentingan ekonomi, solidaritas HAM, dan peningkatan citra nasional (Riddel, 2007, pp. 96-97).

Secara spesifik, Riddel menyimpulkan ada delapan kelompok motif *foreign aid*. Motif-motif tersebut yaitu; 1) membantu menemukan (*address*) masalah kebutuhan darurat, 2) membantu mencapai tujuan pembangunan (perkembangan dan mengurangi kemiskinan), 3) menunjukkan solidaritas, 4) memajukan politik dan kepentingan strategis nasional baik negara pemberi maupun penerima donor, 5) membantu mempromosikan kepentingan komersial negara pemberi donor, 6) memiliki hubungan sejarah (*historical ties*), 7) memberikan serta memperkuat komoditas barang publik secara global sekaligus mengurangi efek buruk dari

kejahatan-kejahatan global, dan 8) mengurangi atau memberhentikan donor kepada negara-negara yang memiliki kasus buruknya HAM. Mayoritas donor dialokasikan berdasarkan campuran dari motif-motif tersebut, dimana komposisi dalam campuran tersebut dapat berbeda tergantung dari pihak pemberi donor dan jalannya waktu yang masih menjadi norma *decision-making donor* (Riddell, 2007, pp. 91-92).

Salah satu bentuk dari *foreign aid* adalah development aid (bantuan pembangunan). *Development aid* merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah negara atau lembaga donor untuk mendukung usaha pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial politik negara-negara berkembang. *Development aid* umumnya diperuntukkan untuk usaha yang bersifat jangka panjang seperti penanggulangan kemiskinan (Mahottama, 2011).

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menggunakan istilah *Official Development Assistance* (ODA) dalam menjelaskan development aid. OECD menjelaskan:

“Aliran bantuan yang dikelola secara resmi dengan mempromosikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara berkembang sebagai tujuan utama, dan yang bersifat lunak dengan elemen hibah minimal 25 persen (menggunakan tingkat diskon tetap 10 persen). Berdasarkan konvensi, aliran ODA terdiri dari kontribusi lembaga-lembaga pemerintah donor, pada semua tingkatan, kepada negara-negara berkembang (“ODA bilateral”) dan

lembaga-lembaga multilateral. Penerimaan ODA terdiri dari pencairan dana oleh donor bilateral dan lembaga multilateral.”

Dari definisi tersebut, maka dapat dikatakan ODA memiliki tiga elemen, yaitu: 1) dilaksanakan oleh pemerintah, 2) ditujukan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sebagai tujuan utamanya, dan 3) bantuan finansial bersifat konsensi dan apabila berupa pinjaman maka 25 persennya merupakan hibah.

Pemberian bantuan bisa bersifat bilateral maupun multilateral, dimana bantuan bilateral biasanya diberikan secara langsung diberikan oleh negara donor kepada negara penerima. Sementara itu, bantuan multilateral biasanya diserahkan oleh negara-negara donor kepada lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia yang kemudian akan didistribusikan ke berbagai negara yang membutuhkan bantuan tersebut (Mahottama, 2011). Menurut data OECD (2009), proporsi bantuan luar negeri yang tersebar di seluruh dunia terdiri dari 70% bilateral dan 30% multilateral. Sementara itu, dari keseluruhan total bantuan, sekitar 80-85% merupakan ODA, sementara 15-20% sisanya berasal dari lembaga-lembaga internasional non-pemerintah atau NGO.

Bantuan luar negeri umumnya diberikan oleh institusi negara, namun tidak sepenuhnya demikian. *Foreign aid* dapat diberikan oleh *private organization* bahkan individu. Meskipun *foreign aid* memiliki banyak fungsi, motif, dan fokus, Lancaster tetap menulis jika pemberian *foreign aid* memiliki motivasi dengan unsur altruism dan humanitarisme. Bantuan ini dapat berupa bantuan finansial seperti

hibah dan pinjaman atau dalam bentuk barang material, tenaga kerja, maupun tenaga ahli.

Meskipun dalam definisi *foreign aid* terdapat istilah mengenai konsensi atau penyerahan, *foreign aid* yang ditujukan kepada negara-negara berkembang biasanya hadir dalam bentuk pinjaman atau hutang. Hal ini dikritik oleh para pakar salah satunya Stiglitz (2007: 211-245), yang menyatakan bahwa *foreign aid* yang bersifat hutang tidak akan bisa mencapai tujuan secara efektif. Hutang luar negeri ini telah menyebabkan banyak negara berkembang dan dunia ketiga jatuh ke dalam lubang krisis yang lebih parah.

2.3 Konsep Daya Saing Pendidikan

Daya saing terdiri dari dua kata “daya” dan “saing”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “daya” memiliki beberapa arti: 1) kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak, 2) kekuatan; tenaga (yang menyebabkan sesuatu bergerak, dan sebagainya), 3) muslihat, 4) akal; ikhtiar, atau upaya. Sedangkan kata “saing” dimaknai sama dengan “bersaing” yang kemudian dimaknai dengan kata berlomba (atas mengatasi atau mendahului. Secara bahasa, peningkatan daya saing terdiri dari dua kata yaitu peningkatan dan daya saing. Kata peningkatan memiliki arti proses, cara, atau perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan lain-lain). Sedangkan daya saing merupakan kekuatan berusaha untuk menjadi lebih dari yang lain atau lebih unggul dalam segala hal (Umayah, 2015).

Daya saing sekolah sendiri diartikan sebagai kemampuan satuan pendidikan sekolah yang melakukan tindakan atau upaya tertentu dalam rangka meningkatkan

mutu pendidikannya agar lebih unggul dan mampu bersaing dengan satuan pendidikan lain yang setara (Tholkhah, 2016). Secara konseptual, salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing yaitu dengan inovasi. Inovasi sendiri berarti pembaruan atau penemuan baru. Dari pengertian ini, maka daya saing sekolah dapat dilakukan dengan memperbarui atau memperbaiki berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan madrasah.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, dinyatakan bahwa daya saing adalah kemampuan untuk menunjukkan hasil yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih bermakna. Kemampuan yang dimaksud dalam Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tersebut, diperjelas oleh Tumar Sumihardjo, meliputi:

1. Kemampuan memperkokoh posisi pasarnya
2. Kemampuan menghubungkan dengan lingkungannya
3. Kemampuan meningkatkan kinerja tanpa henti
4. Kemampuan menegakkan posisi yang menguntungkan

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan jika suatu sekolah akan memiliki kemampuan bersaing atau memiliki potensi untuk bersaing apabila dapat menciptakan dan menawarkan nilai pelanggan yang lebih atau kinerjanya lebih baik dibandingkan dengan organisasi lainnya (Rukiyah & Syahid, 2022).

Daya saing adalah potensi atau kemampuan lembaga untuk mengungguli persaingan yaitu keunggulan disatu bidang yang tidak dimiliki oleh pihak lain. Daya saing ini berkorelasi dengan mutu madrasah, semakin berkualitas dan

profesional pengelolaan madrasah. Daya saing dalam pendidikan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, namun merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan terkait (Umayah, 2015). Untuk mengetahui pencapaian mutu dan daya saing dalam suatu institusi, mutu haruslah dikaitkan dengan input dan output.

Input proses pendidikan dinyatakan bermutu apabila siap berproses. Proses pendidikan yang bermutu adalah proses pendidikan yang mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Sedangkan output dinyatakan berhasil apabila hasil akademik dan non akademik siswa tinggi. Proses pendidikan yang bermutu dan berdaya saing memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, karena dapat meningkatkan pertanggungjawaban (akuntabilitas) sekolah kepada masyarakat dan pemerintah, menjamin mutu lulusannya, bekerja lebih profesional, dan meningkatkan persaingan yang sehat. Untuk melihat keberhasilan madrasah atau sekolah dalam meningkatkan mutu dan daya saing pendidikannya tidak hanya dari nilai ujian akhir yang diperoleh oleh siswa, namun juga dapat dilihat dari faktor-faktor lain yang ada di lingkungan sekolah (Umayah, 2015).

Secara praktis, indikasi adanya daya saing madrasah ada dua yaitu; pertama, jumlah pendaftar melampaui kapasitas ruang belajar yang tersedia. Semakin banyak jumlah pendaftar maka semakin tinggi daya saing yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Kedua, meraih prestasi kejuaraan setiap tahun, baik pada bidang akademik maupun non akademik. Raihan prestasi mulai dari tingkat rendah yaitu pada tingkat kota/kabupaten dan tingkat tertinggi pada tingkat internasional.

Menurut Tholkah, daya saing sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu; pertama, *leadership* atau kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah yang berkualitas tinggi akan mampu menggerakkan, memanfaatkan, dan membangun komitmen yang tinggi terhadap segenap unsur sekolah untuk secara bersama meningkatkan daya saing. Dengan kepemimpinan kepala sekolah yang kuat sangat berpengaruh untuk mendorong sekolah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan saasaran melalui program-program yang dilaksanakan. Kepala sekolah yang memiliki kepemimpinan yang berkualitas akan mampu memanfaatkan potensi *stakeholders* untuk mendukung peningkatan daya saing sekolah tersebut.

Kedua, faktor inovasi pembelajaran madrasah. Inovasi pembelajaran akan sangat mempengaruhi tingkat daya saing sekolah. Inovasi pembelajaran ini dapat berupa metodologi yang digunakan dalam pembelajaran yang mampu meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Inovasi pembelajaran ini dapat berupa substansi, dengan memberikan materi—materi tambahan di luar kurikulum konvensional. Inovasi pembelajaran dapat juga bersifat instrumental dengan menyediakan sarana belajar yang canggih, modern, unik, dan memiliki daya tarik dan citra positif bagi masyarakat. Untuk menerapkan inovasi pembelajaran ini sangat bergantung pada kepala sekolah dan guru.

Ketiga, kualitas pendidik. Kualitas pendidikan memiliki pengaruh yang besar pada tingkat daya saing sekolah. Kualitas pendidik akan memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas peserta didik dalam meraih prestasi. Dengan semakin meningkatnya peserta didik yang berprestasi maka akan berpengaruh pada

peningkatan daya saing sekolah tersebut. Kualitas pendidik sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah, dalam arti sejauh mana kepala sekolah memberikan pembinaan, bimbingan, kontrol, evaluasi, dan motivasi terhadap tenaga pendidik.

Keempat, kualitas sarana. Di beberapa sekolah yang termasuk sekolah unggulan memiliki kualitas sarana yang memadai. Dengan kualitas sarana yang tinggi maka akan meningkatkan daya tarik masyarakat untuk memasukkan anak mereka ke sekolah. Kualitas serta keberadaan sarana sangat dipengaruhi oleh pola kepemimpinan kepala sekolah.

Kelima, kualitas kerjasama. Kerjasama yang dijalin oleh sekolah dengan pihak-pihak terkait sangat bergantung dalam menentukan kualitas daya saing sekolah. Kerjasama akan memberikan keuntungan yang besar yang bersifat material maupun non-material. Terjadinya kerjasama yang dilakukan oleh sekolah juga sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan kepala sekolah.

Keenam, prestasi sekolah. Prestasi yang dimiliki oleh sekolah baik akademik maupun non akademik dalam ajang kompetisi baik di tingkat lokal maupun nasional yang diselenggarakan oleh unit-unit atau organisasi pendidikan dapat mendorong meningkatkan daya saing sekolah. Prestasi sekolah merupakan salah satu indikasi dari sebuah sekolah yang berkualitas dan berdaya saing. Semakin banyak prestasi yang diperoleh, maka akan semakin meningkatkan daya tarik masyarakat yang berarti meningkatkan daya saing madrasah. Prestasi yang diperoleh dapat berupa prestasi peserta didik, prestasi dari pendidik, atau prestasi institusi.

Ketujuh, minat masyarakat. Tingginya jumlah peminat yang masuk di sekolah dapat menjadi indikasi sekolah tersebut berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi. Semakin tinggi jumlah peminat, maka akan smemungkinkan adanya seleksi peserta didik, sehingga sekolah bisa mendapatkan input siswa yang berkualitas. Input siswa yang berkualitas ini akan memudahkan sekolah meningkatkan prestasi.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan kontribusi baru dalam bidang yang belum banyak dieksplorasi oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian terdahulu sangat diperlukan sebagai acuan dan dasar yang kokoh untuk memandu jalannya penelitian ini. Dengan memanfaatkan pengetahuan dan temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya, penulis dapat memastikan bahwa penelitian ini didasarkan pada landasan yang kuat dan relevan.

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dan signifikan terhadap topik yang diangkat dalam penelitian ini. Penleitian-penelitian terdahulu tersebut memberikan wawasan yang berharga, baik dari segi metodologi, hasil, maupun interpretasi yang dapat digunakan untuk memperkuat argumen dan temuan dalam penelitian ini. Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dan akan membantu penulis menulis skrispi ini: Penelitian pertama yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu berjudul “Analisis Bantuan Luar Negeri Bank Dunia (World Bank) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Periode 2007-2009 (Studi Kasus PNPM Mandiri)”. Penelitian ini sendiri menganalisis faktor-faktor kemiskinan di Indonesia serta bagaimana bantuan luar negeri Bank Dunia dalam

mengentaskan kemiskinan di Indonesia dengan tujuan mengejar target MDGs pada periode 2007-2009. Bantuan Bank Dunia dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia pada tahun 2007-2009 ini disalurkan melalui program pengentasan kemiskinan nasional yang dikenal dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Penelitian ini melihat bagaimana efektivitas program PNPM Mandiri dalam mengentaskan kemiskinan di masyarakat serta bagaimana dampak bantuan luar negeri Bank Dunia terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Penelitian kedua yaitu berjudul “Peran Bank Dunia Dalam Perkembangan Kebijakan Perlindungan Sosial di Indonesia Pasca Krisis Finansial Asia 1997”. Penelitian ini menganalisis peran Bank Dunia dalam perkembangan sektor perlindungan sosial di Indonesia. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai interaksi organisasi internasional dengan negara berkembang di sektor perlindungan sosial. Penelitian ini memaparkan mengenai Bank Dunia yang memiliki peran penting dalam proses perkembangan program perlindungan sosial di Indonesia yang ditinjau dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pendanaan. Adapun periode pasca Krisis Finansial Asia 1997 dipilih oleh penulis karena kebijakan perlindungan sosial di Indonesia secara resmi dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dan Bank Dunia pada periode tersebut sebagai upaya untuk meredam dampak krisis yang terjadi di Indonesia.

Penelitian ketiga berjudul “Bantuan Dana Bank Dunia dalam Perspektif Pemenuhan Hak-Hak EKOSOB: Studi Kasus pada Sektor Pendidikan di

Indonesia”. Penelitian ini menganalisis karakteristik bantaun pendidikan oleh Bank Dunia bagi negara dunia ketiga dan keseuaian standar bantuan Bank Dunia dengan pemenuhan hak EKOSOB di bidang pendidikan di Indonesia. Penelitian ini memaparkan mengenai bagaimana pemenuhan hak pendidikan di sebagian besar negara berkebang perlu mendapatkan intervensi dan dukungan dari Bank Dunia dalam rangka mencapai tujuan dari pelayanan pendidikan, serta memastikan dana bantuan yang diberikan telah dikerjakan dalam proyek-proyek pendidikan yang tepat sasaran untuk mewujudkan peserta didik dengan standar pendidikan global.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, penulis akan mengklasifikasikan penelitian-penelitian tersebut dalam table yang akan membantu memvisualisasikan perbedaan dan persamaan di antara penelitian-penelitian tersebut, serta memudahkan pembaca dalam memahami informasi yang disajikan.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 1

Judul	Tujuan	Teori	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
Analisis Bantuan Luar Negeri Bank Dunia (World Bank) Dalam Pengentasan Kemiskinan di	Menganalisis bantuan dari Bank Dunia untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia melalui	Bantuan Luar Negeri (<i>foreign aid</i>)	Bantuan Bank Dunia disalurkan kepada program PNPM Mandiri yang menysasar masyarakat di	Menganalisis peran Bank Dunia dalam pengentasan kemiskinan. Analisis dilakukan

Indonesia Periode 2007-2009 (Studi Kasus PNPM Mandiri)	program PNPM Mandiri.		tingkat lebih sederhana dengan cakupan hampir 70% kelurahan dan kota	melalui program PNPM Mandiri.
Peran Bank Dunia Dalam Perkembangan Kebijakan Perlindungan Sosial di Indonesia Pasca Krisis Finansial Asia 1997	Menganalisis peran Bank Dunia dalam perkembangan kebijakan perlindungan sosial di Indonesia.	<i>Neo-Gramscianism Framework</i>	Bank Dunia memiliki peran penting dalam proses pengembangan program perlindungan sosial di Indonesia	Menganalisis peran Bank Dunia dalam perlindungan sosial di Indonesia sebagai strategi untuk mempertahankan norma neoliberalisme di dalam tatanan global.
Bantuan Dana Bank Dunia dalam Perspektif Pemenuhan Hak-	Menganalisis karakteristik bantuan pendidikan Bank Dunia bagi	Konsep Bantuan (Grant) dan Pinjaman	Pemenuhan hak-hak pendidikan di negara berkembang	Menganalisis peran Bank Dunia secara dalam pemenuhan hak

Hak EKOSOB: Studi Kasus pada Sektor Pendidikan di Indonesia	negara dunia ketiga dan kesesuaian standar bantuan Bank Dunia dengan pemenuhan hak EKOSOB di bidang pendidikan di Indonesia.	(Loan) Dana Pendidikan	memerlukan intervensi dan dukungan dari Bank Dunia	EKOSOB melalui bantuan di bidang pendidikan.
--	---	---------------------------	---	--